

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada Bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif belum terlaksana secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya dan ini jelas saja kurang menjalankan amanat Pasal 344 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “membentuk Perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota”.
2. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa kurang luasnya lingkup sosialisasi pemerintah dimana penyusunan rancangan peraturan daerah hanya diketahui sebagian masyarakat dimana belum dapat mewakili aspirasi masyarakat tersebut, substansi ide masyarakat dalam partisipasi kurang tepat yang dipengaruhi faktor pengetahuan masyarakat yang

kurang memahami dengan baik dengan baik substansi dari rancangan peraturan daerah yang akan diajukan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dimana masyarakat cenderung tidak peduli akan haknya sebagai objek bahkan subjek dari suatu peraturan daerah dan enggan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan daerah.

3. Upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir membentuk Panitia Legislasi, perlu diadakan diklat, seminar dan lokakarya tentang penyusunan peraturan daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang disiplin ilmunya berbeda dengan bidang tugasnya, perekrutan calon anggota Dewan yang dilakukan oleh partai harus didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya termasuk fungsi legislasi, pada saat proses pembahasan rancangan peraturan daerah sebaiknya tidak hanya melibatkan dari stakeholder yang terkait saja, tetapi juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan lebih sering

melakukan hearing dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

B. Saran

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka penulis memberikan saran perubahan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar kualitasnya lebih baik dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih maksimal sehingga tidak mengecewakan masyarakat.
2. Perlu diperluas tugas dari tenaga ahli yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang tidak hanya bertugas paruh waktu, bukan saja memberikan masukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tetapi juga lebih dari itu. Dan perlu kiranya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menunjang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang memberikan gambaran tentang pembuatan Peraturan Daerah.
3. Perlu menyediakan anggaran untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan salah satu fasilitasi bagi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2007

HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung; Refika Aditama, 2009

-----,dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta; Rineka Cipta, 1999

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Syaukani,HR, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah (Edisi Ke-II dengan Revisi)*, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1993

Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

S.F.Marbun,*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,Yogyakarta:Liberty,2009

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Edisi Revisi*, Bandung; Fokus Media, 2003

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan
Pusat dan daerah

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor KPTS 48 Tahun 2013 Tanggal 24 April 2013 tentang Susunan
Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir